

**PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM
MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Kelvin Raya Ketaren

03051170041

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam pemberantasan money laundering di Indonesia.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui/menggunakan data sekunder (data kepustakaan), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara melakukan studi kepustakaan.

Dari penelitian ini diketahui bahwa PPATK adalah lembaga yang independen dengan peranan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengelolaan data transaksi yang mencurigakan, pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, analisis terhadap transaksi pencucian uang dan meneruskan kepada penyidik terhadap terjadinya pencucian uang. Hambatan PPATK dapat berupa *database* yang terbatas dan belum terintegrasi dan belum semua transaksi yang mencurigakan dilaporkan, kewenangan PPATK yang terbatas seperti itu tidak dapat melakukan penyelidikan.

Kata Kunci: Peranan PPATK, Tindak Pidana Pencucian Uang

THE ROLE OF THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTING AND ANALYSIS CENTER (PPATK) IN PREVENTING AND ERADICATING THE CRIME OF LAUNDERING

Kelvin Raya Ketaren

03051170041

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in preventing and eradicating the crime of money laundering and to find out how the implementation of law enforcement in eradicating money laundering in Indonesia.

The research method that the author uses is a normative legal research method, namely research conducted through / using secondary data (library data), namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. This approach uses a normative juridical approach, in the form of laws and regulations, namely Law Number 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering by conducting a literature study.

From this research, it is known that PPATK is an independent institution with the role of Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, management of suspicious transaction data, supervision of financial service providers, analysis of money laundering transactions and forwarding to investigators against money laundering. PPATK's obstacles can be in the form of a limited and not integrated database and not all suspicious transactions have been reported, the PPATK limited authority as such cannot carry out investigations.

Kata Kunci : The role of PPATK, Money Laundering Crime